



Judul : Peternak Unggas Masih Bisa Untung
Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pasokan Stabil Di Masa Pandemi Peternak Unggas Masih Bisa Untung

PELAKU usaha perunggasan menghargai jerih payah pemerintah menstabilkan penyediaan dan peredaran ayam ras dan petelur hingga ke masyarakat. Pemerintah juga telah berupaya memastikan kesejahteraan para peternak tetap terjaga selama pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Singgih Januratmoko mengatakan, para peternak tetap memperoleh untung yang baik selama pandemi. Para pelaku perunggasan juga selalu diajak bekerja sama dengan pemerintah dalam mencari solusi-solusi terbaik setiap kali terjadi gejolak harga daging dan unggas di konsumen.

"Sehingga usaha peternakan unggas dapat tumbuh dan terakselerasi dengan baik, terutama di masa pandemi," tegas Singgih yang juga Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) di Jakarta, kemarin. Dia pun menyayangkan adanya langkah hukum salah satu asosiasi peternak yang menggugat pemerintah terkait upaya menstabilkan usaha perunggasan. Harusnya setiap persoalan diselesaikan dengan mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bidang Peternakan dan Perikanan Ki Musbar Mesdi. Menurutnya, pemerintah telah berupaya memastikan kelangsungan para peternak tetap terjaga selama pandemi ini.

Hal itu bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dalam salah poin aturannya, pelaku usaha yang memproduksi ayam ras pedaging dengan kapasitas produksi paling rendah 300.000 ekor per minggu, diwajibkan mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dengan fasilitas rantai dingin.

"Kenapa regulasi ini diperlukan, karena untuk melayani

permintaan pasar untuk *fresh carcass* atau daging segar, dan bukan *Livebird* (LB)," ucap Musbar.

Selain itu, pemerintah juga telah sering kali mengimbau para peternak agar dapat membentuk koperasi sendiri sebagai upaya penguatan ekonomi dan perlindungan bagi para peternak ini sendiri.

"Koperasi, penguatan ke dalam, masalah pengawasan dan sebagainya, semuanya telah tertuang dalam Permentan itu," tambahnya.

Ketua Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional (Gopan) Heri Darmawan menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah mengendalikan produksi ayam ras.

Dia berharap, semua insan perunggasan dapat bergandengan tangan dan ikut menciptakan suasana usaha perunggasan yang kondusif.

"Kita harus menghindari saling menyalahkan atau saling menuntut, baik antara peternak atau peternak dengan pemerintah," harap Heri.

Sementara, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah mengatakan, pemerintah selama ini terus melakukan upaya serius memecahkan permasalahan peternakan rakyat.

Bahkan evaluasi kebijakan selalu melibatkan pelaku usaha, asosiasi peternak dan peternakan rakyat. Termasuk yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tidak hanya itu, pihaknya terus aktif berkomunikasi dan mendengarkan masukan dari para pelaku usaha peternakan dan asosiasi perunggasan, seperti Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Pinsar, Gopan dan lainnya.

"Kita selalu mendengar masukan berbagai pihak. Bahkan, Peraturan Permentan Nomor 32 Tahun 2017 juga merupakan hasil dari masukan semua pihak. Kita akomodir kepentingan mereka," tegas Nasrullah. ■ KAL